COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM REVITALISASI PASAR KAHAYAN KOTA PALANGKARAYA DARI PASAR TRADISIONAL MENJADI PASAR MODERN

MUHAMMAD FARIS ERLANGGA
33.0753
Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah
Email : erlanggaf479@gmail.com

Pembimbing Skripsi : Dr. Ir. H. Dwi Agus Sumarno, M.M, M.Si.
Email : dwi141263@gmail.com

ABSTRACK

Problem (GAP)*: The revitalization of Kahayan Market from a traditional to a modern market is a strategic policy of the Palangka Raya City Government to enhance the competitiveness of the people's economy. However, the success of this transformation faces challenges that heavily rely on the cooperation patterns among various stakeholders. The author focuses on the issue of physical implementation delays due to budget constraints and the dynamics of trust among parties in the revitalization process.* ***Objective:*** *The objective of this study is to analyze the Collaborative Governance process in the revitalization of Kahayan Market.* ***Methods:*** *This study employs a descriptive qualitative method with an inductive approach, utilizing a structured analysis based on the Collaborative Governance theory by Ansell and Gash. Data were collected through observation, documentation, and in-depth interviews with 12 key informants representing the government, community leaders, traditional leaders, and affected traders.* ***Results/Findings****: The findings indicate that the collaboration process has progressed through the stages of starting condition, institutional design, facilitative leadership, and collaborative process, wherein the initial vision among agencies has been established. However, the implementation was hindered by the Regional Budget (APBD) refocusing policy, which led to delays in contract payments and a decline in traders' trust. These obstacles were addressed through the coordination of balancing funds, the establishment of development priority scales, and the provision of levy exemption compensation for traders.* ***Conclusion****:The collaborative process in the revitalization of Kahayan Market has been well-attempted through strategic adjustments, despite significant implementation delays caused by financial issues. To maintain collaboration stability until the project's completion, it is recommended to establish a long-term (multi-year) budget commitment and improve regular information transparency for all stakeholders.*

Keywords*: Market Revitalization; Collaborative Governance; Kahayan Market; Stakeholders*

ABSTRAK

Permasalahan (GAP): Revitalisasi Pasar Kahayan dari pasar tradisional menjadi pasar modern merupakan kebijakan strategis Pemerintah Kota Palangka Raya untuk meningkatkan daya saing ekonomi kerakyatan. Namun, keberhasilan transformasi ini dihadapkan pada tantangan yang sangat bergantung pada pola kerja sama antar berbagai pemangku kepentingan. Penulis berfokus pada permasalahan perlambatan implementasi fisik akibat kendala anggaran dan dinamika kepercayaan antar pihak dalam proses revitalisasi tersebut. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis proses *Collaborative Governance* dalam revitalisasi Pasar Kahayan. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif dan analisis terstruktur merujuk pada teori *Collaborative Governance* oleh Ansell dan Gash. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara mendalam terhadap 12 informan kunci yang merepresentasikan unsur pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh adat, hingga pedagang terdampak. **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu proses kolaborasi telah berjalan mencakup *starting condition, institutional design, facilitative leadership,* dan *collaborative process* di mana visi awal antar instansi telah terbangun. Namun, pelaksanaannya terhambat oleh kebijakan *refocusing* APBD yang memicu keterlambatan pembayaran kontrak dan menurunnya tingkat kepercayaan (*trust*) pedagang. Hambatan ini ditangani melalui koordinasi dana perimbangan, penetapan skala prioritas pembangunan, serta kompensasi pembebasan retribusi pedagang. **Kesimpulan:** Proses kolaborasi dalam revitalisasi Pasar Kahayan telah diupayakan dengan baik melalui penyesuaian strategis, meskipun implementasinya sempat terhambat secara signifikan oleh masalah finansial. Guna menjaga stabilitas kolaborasi hingga proyek revitalisasi selesai, disarankan untuk menyusun komitmen anggaran jangka panjang (*multi-years*) dan meningkatkan transparansi informasi secara berkala kepada seluruh pemangku kepentingan.

Kata kunci: Revitalisasi Pasar; *Collaborative Governance*; Pasar Kahayan; Pemangku Kepentingan

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Transformasi pasar tradisional menjadi pasar modern merupakan instrumen strategis dalam menjaga daya saing dan stabilitas ekonomi kerakyatan di tengah masifnya arus globalisasi, namun dalam implementasinya seringkali mengalami diskoneksi antara orientasi pembangunan infrastruktur fisik pemerintah dengan kesiapan adaptasi dari ekosistem pasar itu sendiri (Wulandari, 2019). Di tingkat daerah, peranan strategis Pasar Kahayan sebagai urat nadi perdagangan di jantung Kota Palangka Raya belum dapat dioptimalkan karena tingginya ketergantungan pada tata kelola konvensional serta masifnya tekanan eksistensial dari menjamurnya pusat perbelanjaan dan ritel modern yang menawarkan fasilitas lebih cepat, nyaman, dan higienis (Nugroho, 2020). Padahal, aktivitas jual-beli di

pasar ini ditopang oleh para pedagang lokal yang menjadikan pasar tidak sekadar sebagai tempat transaksi ekonomi, melainkan juga sebagai ruang interaksi sosial budaya masyarakat setempat (Soetomo, 2017). Tingkat kesadaran Pemerintah Kota Palangka Raya terhadap urgensi revitalisasi sebenarnya sudah terwujud, terbukti dari inisiasi alokasi investasi awal senilai Rp20,7 miliar, perbaikan fasilitas jalan lingkungan, normalisasi drainase, hingga penerapan transaksi non-tunai berbasis SIAP QRIS (Kusuma & Sugiharto, 2021).

Namun demikian, pembangunan fasilitas fisik dan teknologi ini ternyata belum diimbangi dengan perbaikan kualitas tata kelola manajerial serta partisipasi pedagang secara komprehensif (Sirait & Anam, 2024). Upaya optimalisasi Pasar Kahayan dihadapkan pada kendala struktural yang bersumber dari internal pasar itu sendiri, seperti sirkulasi udara yang pengap, tata kelola limbah yang belum tertata, hingga penempatan barang dagangan yang sering kali melampaui batas lapak sehingga menutup jalur sirkulasi pengunjung (Arianty, 2013). Rendahnya kualitas manajemen lingkungan ini berdampak langsung pada ketidaknyamanan pembeli, yang berujung pada menurunnya angka kunjungan dan anjloknya omset pedagang, khususnya tercatat secara signifikan pasca periode Lebaran tahun 2025 (Fanani, 2016). Meskipun pemerintah telah berupaya mendigitalkan sistem pembayaran pasar, penerapannya tidak berjalan maksimal karena sebagian pedagang memiliki keterbatasan literasi teknologi dan masih sangat bergantung pada budaya transaksi tawar-menawar secara konvensional (Taiminen & Karjaluoto, 2015).

Selain kendala kapasitas internal pedagang dan keterbatasan infrastruktur, hambatan paling fundamental bersumber dari kurang optimalnya pola kerja sama (*collaborative governance*) antar pemangku kepentingan dalam mengeksekusi proyek revitalisasi ini (Bryson, Crosby, & Stone, 2015). Meskipun Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian bersama Dinas PUPR Kota Palangka Raya telah melaksanakan program penataan, proses perencanaan di tingkat birokrasi kerap kali terkesan *top-down* tanpa adanya pelibatan aktif dan musyawarah mendalam dengan pedagang yang terdampak (Sirait & Anam, 2024). Keadaan ini menimbulkan tantangan besar, karena minimnya komunikasi dua arah, ketidakpastian kondisi di tempat relokasi sementara, serta lambatnya progres fisik akibat kebijakan pemotongan (*refocusing*) anggaran APBD memicu keresahan massal. Ketidaksinkronan ini pada akhirnya memunculkan resistensi, merusak tingkat kepercayaan (*trust*) masyarakat kepada pemerintah, dan menggagalkan terciptanya kesepahaman bersama (*shared understanding*) di lapangan (Ansell & Gash, 2008). Oleh karena itu, pendekatan kolaboratif yang terstruktur menjadi sangat mutlak diperlukan agar transformasi Pasar Kahayan tidak terhenti sebatas proyek fisik semata, melainkan sukses menjadi pasar modern yang inklusif dan berkelanjutan (Emerson, Nabatchi, & Balogh, 2012).

1.2 Kesenjangan Masalah (*Research Gap*)

Penelitian mengenai revitalisasi pasar tradisional sejatinya telah banyak dilakukan oleh para akademisi terdahulu. Namun, terdapat kesenjangan masalah (*research gap*) baik secara empiris maupun konseptual yang melatarbelakangi penelitian ini. Secara empiris, studi terdahulu seperti yang dilakukan oleh Nurlaili et al. (2022), Andi Sultan (2018), serta Anam, Choirul (2017) mayoritas berfokus

pada evaluasi hasil pembenahan infrastruktur fisik, dampak ekonomi agregat, dan peningkatan taraf kesejahteraan pedagang secara makro (Fanani, 2016). Analisis yang disajikan dalam riset terdahulu belum menyentuh dinamika proses tata kelola pemerintahan secara kolaboratif, sehingga belum mampu memberikan penjelasan terperinci mengenai persoalan interaksi antar-aktor—terutama ketika proyek revitalisasi tersendat oleh defisit anggaran negara.

Secara konseptual, terdapat kesenjangan antara landasan teori yang digunakan dengan realitas aktual di lapangan. Penelitian ini menggunakan Teori *Collaborative Governance* oleh Ansell dan Gash (2008) yang mengkaji empat dimensi utama: *Starting Condition*, *Institutional Design*, *Facilitative Leadership*, dan *Collaborative Process*. Teori ini meyakini bahwa kolaborasi akan terwujud optimal bila sumber daya dialokasikan secara cukup dan dialog terus dijalin demi membangun kepercayaan (Islamy, 2018). Namun, kondisi nyata dalam Revitalisasi Pasar Kahayan menunjukkan perbedaan mendalam:

a. Dimensi *Starting Condition*: Mengasumsikan bahwa ketersediaan sumber daya dan pendanaan awal menjadi motor penggerak partisipasi (Ansell & Gash, 2008). Kenyataannya di lapangan, terjadinya krisis *postur APBD* akibat kebijakan *refocusing* di pertengahan jalan justru menjadi belenggu yang memutus rantai kelancaran proyek dan memicu konflik ekonomi.
b. Dimensi *Collaborative Process*: Berfokus pada upaya membangun komitmen dan kepercayaan (*trust building*) berkelanjutan (Dwiyanto, 2011). Akan tetapi, mandeknya pencairan termin kepada kontraktor membuat progres fisik pasar terhenti, yang secara instan menghancurkan kepercayaan yang sudah terbentuk dan memunculkan sikap pesimis dari pedagang di lapak relokasi sementara (Sirait & Anam, 2024).

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi sangat penting untuk mengisi kekosongan literatur, dengan tidak sekadar mendeskripsikan kolaborasi normatif, tetapi menguji langsung aplikasi Teori *Collaborative Governance* saat menghadapi krisis infrastruktur riil di daerah.

1.3 Urgensi Penelitian

Penelitian ini memiliki urgensi yang sangat krusial bagi pengembangan ilmu terapan pemerintahan, penyelesaian konflik praktis di lapangan, maupun bagi Pemerintah Kota Palangka Raya selaku formulator kebijakan. Secara keilmuan, penelitian ini mendesak dilakukan untuk memberikan kontribusi akademis mengenai implementasi dan resiliensi Teori *Collaborative Governance* (Ansell & Gash, 2008) ketika dihadapkan pada realitas volatilitas anggaran daerah dan gesekan sosial masyarakat (Ranggi, 2016). Secara praktis, riset ini akan menyajikan gambaran empiris konkret mengenai anatomi hambatan struktural kolaborasi, mulai dari kebuntuan komunikasi, lambannya eksekusi teknis, hingga minimnya pelibatan aktor lokal (Kusuma & Sugiharto, 2021).

Apabila penelitian ini tidak dilaksanakan, maka pemerintah daerah akan terus kehilangan dasar empiris yang valid dalam mengurai benang kusut keterlambatan proyek (Subarsono, 2016). Akibatnya, kebijakan penataan ruang yang diambil berisiko hanya bersifat seremonial, kurang efektif, dan mengulangi kesalahan yang sama karena gagal mengakomodasi aspirasi kultural dan ekonomi

para pedagang (Sirait & Anam, 2024). Dampak jangka panjangnya adalah proyek revitalisasi Pasar Kahayan berpotensi mangkrak (*stagnan*), hilangnya legitimasi dan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah, serta kekalahan telak daya saing produk lokal di hadapan ekspansi sektor pasar modern kapitalis (Nugroho, 2020).

1.4 Penelitian Terdahulu

Kajian mengenai modernisasi pasar dan kinerja tata kelola pemerintahan telah dipelajari melalui berbagai pendekatan oleh beberapa peneliti terdahulu. Penelitian Nurlaili et al. (2022) mengkaji revitalisasi fisik dan pengelolaan pasar rakyat di Kabupaten Sumbawa dengan menitikberatkan pada aspek perbaikan estetika kawasan yang kemudian berorientasi pada peningkatan keuntungan pedagang. Selanjutnya, penelitian Ella Alfianita dkk. (2015) meninjau dinamika revitalisasi Pasar Tumpang di Malang dengan menggunakan perspektif parameter dasar Good Governance, khususnya aspek akuntabilitas dan transparansi, namun belum membahas secara mendalam mengenai struktur dialog dan interaksi antar pemangku kepentingan.

Sementara itu, penelitian Mahmuddin Sirait dan M. Syaeful Anam (2024) secara khusus mengkaji kebijakan Pemerintah Kota Palangka Raya dalam pengelolaan Pasar Kahayan dan menemukan bahwa pemerintah masih mengalami kendala dalam membangun kolaborasi aktif dengan pedagang, sehingga berdampak pada lemahnya pelaksanaan pengelolaan serta munculnya polemik terkait harga sewa lapak.

Berdasarkan berbagai penelitian tersebut, dapat dilihat bahwa kajian terdahulu masih banyak berfokus pada evaluasi hasil fisik revitalisasi dan pendekatan kebijakan yang cenderung bersifat satu arah, sementara aspek dinamika interaksi, proses perundingan, serta pembagian kewenangan antar aktor melalui perspektif Collaborative Governance dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan dalam konteks pengelolaan Pasar Kahayan masih belum banyak dikaji secara mendalam.

1.5 Pernyataan Kebaharuan Ilmiah

Penelitian ini memiliki kebaruan ilmiah (novelty) yang membedakannya secara tegas dari penelitian-penelitian terdahulu, baik dari aspek teori, metode, fokus kebijakan, maupun karakteristik objek kajian. Berbeda dengan penelitian Nurlaili et al. (2022) yang berfokus pada evaluasi perbaikan fisik dan manajemen pasar dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi pasar tradisional, penelitian ini tidak hanya melihat hasil akhir berupa infrastruktur dan pengelolaan pasar, tetapi lebih jauh menganalisis mekanisme interaksi antaraktor pemerintahan dan pemangku kepentingan dalam proses kebijakan dengan menggunakan perspektif Collaborative Governance.

Selain itu, penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian Andi Sultan (2018) yang mengkaji dampak pascakebijakan revitalisasi pasar terhadap kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat di Kepulauan Selayar. Penelitian ini tidak menitikberatkan pada capaian kesejahteraan setelah proyek berjalan, melainkan berfokus pada proses tata kelola selama masa transisi kebijakan,

terutama dengan mengkaji fenomena refocusing APBD di pertengahan pelaksanaan proyek sebagai bentuk hambatan kritis (critical bottleneck) yang memengaruhi keberlangsungan kolaborasi antaraktor.

Kebaruan penelitian ini juga terlihat dibandingkan dengan penelitian Ella Alfianita dkk. (2015) yang menggunakan pendekatan Good Governance dengan empat prinsip utama, yaitu akuntabilitas, partisipasi, kepastian hukum, dan transparansi. Penelitian ini menawarkan pendekatan teoritis yang lebih spesifik melalui konsep Collaborative Governance dari Ansell dan Gash dengan menitikberatkan pada dimensi kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, serta proses kolaborasi. Pendekatan tersebut memungkinkan penelitian ini mengkaji lebih dalam mengenai proses negosiasi, komunikasi, pembangunan kepercayaan (trust building), serta hubungan antaraktor dalam pengelolaan Pasar Kahayan.

Selanjutnya, penelitian ini berbeda dengan penelitian Choirul Anam (2017) yang mengkaji pembaruan tata kelola, penyediaan fasilitas fisik, dan aspek nonfisik seperti kerja sama permodalan dengan perbankan sebagai strategi menghadapi persaingan hipermarket. Penelitian ini memiliki fokus yang lebih spesifik dalam merumuskan mekanisme penyelesaian konflik melalui pendekatan kultural dan kompensatif, seperti strategi komunikasi krisis, pemberian insentif kompensasi berupa pembebasan retribusi, serta keterlibatan tokoh adat lokal dalam meredakan konflik akibat keterlambatan pelaksanaan proyek.

Sementara itu, penelitian ini juga memperluas kajian yang dilakukan oleh Moch. Irfan Fanani (2016) yang memetakan bentuk serta faktor penyebab resistensi pedagang lama terhadap kebijakan revitalisasi pasar. Jika penelitian sebelumnya lebih berfokus pada identifikasi masalah resistensi, penelitian ini melangkah lebih jauh dengan menganalisis bagaimana dimensi kepemimpinan fasilitatif (facilitative leadership) dan desain kelembagaan dalam Collaborative Governance dapat digunakan sebagai instrumen untuk mengatasi resistensi, membangun kembali kepercayaan, serta menyatukan visi antaraktor dalam pengelolaan Pasar Kahayan.

1.6 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam proses *Collaborative Governance* pada revitalisasi Pasar Kahayan Kota Palangka Raya menjadi pasar modern.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif, yaitu metode penelitian yang berfokus pada pemahaman mendalam mengenai fenomena sosial secara kontekstual dengan mendeskripsikan kejadian riil apa adanya di lapangan pada saat penelitian dilaksanakan (Afrisal, 2022). Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada kebutuhan penelitian untuk tidak hanya mendeskripsikan fenomena secara umum dari hasil fisik pembangunan semata, melainkan menganalisis secara mendalam mengenai proses, dinamika, dan upaya nyata dalam pelaksanaan *Collaborative Governance* pada revitalisasi Pasar Kahayan dari pasar tradisional menjadi pasar modern. Dengan menggunakan

pendekatan ini, peneliti mampu mengurai kompleksitas permasalahan dan hambatan yang dialami di lapangan secara mendalam, seperti perbedaan visi dan kepentingan antar pemangku kepentingan, kendala anggaran akibat *refocusing* APBD, resistensi dari pedagang lama, serta permasalahan fasilitas pasar yang kurang memadai (Wulandari, 2019). Oleh karena itu, pendekatan kualitatif-induktif dinilai paling tepat untuk menangkap fenomena riil tata kelola kolaboratif di lapangan yang tidak dapat dijelaskan secara utuh jika hanya bertumpu pada data numerik atau kuantitatif.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur (*in-depth interview*), observasi langsung, dan dokumentasi (Samsu, 2021). Penentuan narasumber dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling* untuk memastikan bahwa informan yang dipilih memenuhi syarat khusus serta memiliki pengetahuan mendalam dan keterlibatan langsung dengan objek penelitian (Kususmasuti, 2019). Informan dalam penelitian ini berjumlah 12 orang, yang merepresentasikan berbagai unsur, mulai dari Walikota Palangka Raya sebagai pemegang otoritas kebijakan tertinggi, Kepala Dinas Perindagkop UMKM, Kepala Dinas Perhubungan, dan Kepala Dinas PU PR sebagai unsur pemerintah pengambil keputusan strategis lintas sektoral. Selain itu, informan pelaksana lainnya melibatkan Camat Jekan Raya, Kepala Bidang di Dinas Perindagkop UMKM, Kepala Bidang di Dinas Perhubungan, dan Kepala Bidang Cipta Karya PU PR selaku penanggung jawab teknis pelaksanaan revitalisasi. Dari elemen non-pemerintah, penelitian ini juga mewawancarai Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, serta Masyarakat yang terkena dampak revitalisasi pasar sebagai subjek utama terdampak. Kombinasi seluruh informan ini dipilih secara sengaja untuk menghasilkan gambaran informasi yang utuh dan berimbang dari sudut pandang pembuat kebijakan (pemerintah), pelaksana teknis, hingga pedagang dan elemen kultural masyarakat setempat.

Teknik pengujian keabsahan data dalam penelitian kualitatif ini dilakukan melalui pengumpulan data dengan teknik triangulasi yang kemudian dianalisis secara induktif untuk menjamin informasi yang akurat dan objektif (Sugiyono, 2014). Kredibilitas data dijaga melalui teknik triangulasi sumber dengan membandingkan data hasil wawancara antara pejabat pemerintah daerah (Dinas Perindagkop UMKM, Dinas PU PR, Dinas Perhubungan), tokoh masyarakat atau adat, serta para pedagang terdampak. Selain itu, dilakukan juga triangulasi teknik dengan membandingkan hasil wawancara semi-terstruktur bersama data hasil observasi langsung terhadap kegiatan pasar dan pertemuan kolaboratif, serta dokumen-dokumen resmi perencanaan revitalisasi dan laporan proyek (Afrisal, 2022). Penulis memegang peranan penting sebagai instrumen utama penelitian yang terjun langsung ke lapangan, sehingga seluruh proses pengumpulan dan analisis data didasarkan pada fenomena nyata dan dapat terhindar dari bias subjektif peneliti (Moleong, 2017).

Analisis data dilakukan secara interaktif saat data dikumpulkan mengikuti model analisis kualitatif yang dikemukakan oleh Huberman & Miles (1994), yang mencakup tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi, data mentah hasil wawancara dan catatan lapangan disaring, dipilih, dan diorganisasikan secara sistematis ke dalam pola atau tema yang relevan dengan

tata kelola kolaboratif. Selanjutnya, data disajikan secara naratif dan terstruktur (penyajian data) agar benang merah dinamika kolaborasi mudah dipahami dan memudahkan perancangan langkah analisis selanjutnya (Abdussamad, 2021). Hasil analisis tersebut kemudian dikaji secara mendalam menggunakan pisau analisis Teori *Collaborative Governance* Ansell dan Gash (2008) yang membedah empat dimensi utama: dimensi *Starting Condition* (kondisi awal seperti ketimpangan sumber daya, insentif, dan konflik), dimensi *Institutional Design* (aturan main, transparansi, dan partisipasi forum), dimensi *Facilitative Leadership* (kepemimpinan fasilitatif yang mengarahkan proses kolaborasi), serta dimensi *Collaborative Process* (proses dialog tatap muka, membangun kepercayaan, pemahaman bersama, hingga hasil sementara pembangunan fisik) (Islamy, 2018).

Penelitian ini dilaksanakan di Pasar Kahayan yang terletak di Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, yang merupakan pusat kegiatan ekonomi dan perdagangan tradisional strategis di wilayah tersebut. Pengumpulan data di lapangan dilaksanakan dalam rangkaian jadwal penelitian akademik mulai Agustus 2025 hingga Juni 2026, yang mencakup tahapan pra-lapangan, pelaksanaan wawancara mendalam bersama jajaran pemerintah kota dan elemen masyarakat, hingga pengumpulan dokumen pendukung terkait regulasi revitalisasi. Dengan rentang waktu dan lokasi pelaksanaan tersebut, penelitian ini mampu menyajikan potret yang aktual dan kontekstual mengenai dinamika kolaborasi, tantangan operasional akibat kendala finansial, serta upaya penyelesaian konflik dalam proses transformasi pasar tradisional menjadi pasar modern.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, penulis melakukan analisis mendalam mengenai efektivitas *Collaborative Governance* dalam revitalisasi Pasar Kahayan Kota Palangka Raya. Pendekatan analisis ini merujuk pada kerangka teoritis Ansell dan Gash (2008), yang memandang kolaborasi bukan sebagai sebuah titik akhir, melainkan sebagai proses interaktif yang dipengaruhi oleh kondisi awal, struktur kelembagaan, gaya kepemimpinan, dan dinamika proses kolaborasi itu sendiri.

3.1 Dimensi Kondisi Awal (*Starting Conditions*)

Starting conditions merupakan fondasi yang menentukan apakah sebuah kolaborasi akan berjalan atau justru terhambat sejak awal (Ansell & Gash, 2008). Dalam konteks revitalisasi Pasar Kahayan, terdapat kesenjangan kekuasaan (*power imbalance*) yang mencolok antara Pemerintah Kota Palangka Raya sebagai pemegang otoritas dan para pedagang sebagai subjek terdampak. Secara teoritis, ketimpangan sumber daya dan otoritas ini sering kali memicu hambatan dalam mencapai konsensus (Bryson, Crosby, & Stone, 2015).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa riwayat hubungan antara pemerintah dan pedagang pasar cenderung bersifat monologis. Pemerintah memiliki motivasi kuat untuk melakukan modernisasi infrastruktur demi menaikkan citra kota, namun pemerintah gagal mengidentifikasi ekspektasi pedagang terhadap kelangsungan usaha selama masa konstruksi. Ketimpangan informasi ini menciptakan ketidakpercayaan (*distrust*) yang mendalam. Sebagaimana dikemukakan oleh

Cai, Y., Yuen, B., & Nearing, C. M. (2026), ketika tidak ada kesetaraan dalam memandang urgensi sebuah perubahan, maka resistensi akan menjadi respons rasional dari pihak yang merasa kepentingannya terancam. Dalam kasus Pasar Kahayan, kondisi awal ini tidak dibarengi dengan dialog intensif, sehingga kolaborasi hanya bersifat formalitas administratif tanpa adanya kesepahaman visi sejak awal (Islamy, 2018).

3.2 Dimensi Desain Kelembagaan (*Institutional Design*)

Desain kelembagaan mencakup aturan main (*ground rules*) yang menyepakati bagaimana forum kolaborasi dijalankan, termasuk transparansi proses, inklusivitas partisipasi, dan kejelasan mekanisme pengambilan keputusan (Ansell & Gash, 2008). Dalam revitalisasi Pasar Kahayan, ditemukan bahwa forum-forum yang dibentuk oleh dinas terkait (Dinas Perindagkop dan Dinas PUPR) cenderung bersifat tertutup dan eksklusif.

Penyusunan regulasi atau tata tertib relokasi pedagang sering kali dilakukan secara *top-down* tanpa melibatkan partisipasi aktif pedagang dalam perumusan kebijakan yang berdampak langsung pada nasib ekonomi mereka. Padahal, desain kelembagaan yang partisipatif sangat krusial untuk menciptakan "ruang aman" bagi pedagang untuk menyampaikan keluhan (Wulandari, 2019). Tanpa adanya kejelasan mengenai *timeline* pembangunan dan transparansi anggaran, pedagang merasa tidak memiliki posisi tawar yang adil. Hal ini sejalan dengan pandangan Emerson, Nabatchi, & Balogh (2012) yang menyatakan bahwa tanpa kelembagaan yang inklusif, forum kolaborasi hanya akan menjadi alat legitimasi kebijakan pemerintah semata, bukan wadah penyelesaian masalah kolektif.

3.3 Dimensi Kepemimpinan Fasilitatif (*Facilitative Leadership*)

Kepemimpinan fasilitatif adalah variabel kunci yang menjembatani kebuntuan dalam kolaborasi. Peran pemimpin bukan sekadar memerintah, melainkan memberdayakan, memediasi konflik, dan membangun *trust* di antara para pihak (Ansell & Gash, 2008). Dalam revitalisasi Pasar Kahayan, gaya kepemimpinan yang dominan adalah kepemimpinan birokratis yang kaku, yang lebih menitikberatkan pada pencapaian target fisik daripada pengelolaan dinamika sosial pedagang.

Pemimpin di level dinas teknis (PUPR dan Perindagkop) sering kali tidak memiliki kapasitas atau waktu yang cukup untuk turun ke lapangan guna menenangkan kegelisahan pedagang. Ketika terjadi keterlambatan proyek, kepemimpinan yang fasilitatif seharusnya mampu memberikan penjelasan logis dan insentif sosial kepada pedagang, bukan malah menciptakan jarak. Kurangnya kepemimpinan yang mampu "menghubungkan" (*bridging*) antara aspirasi pedagang dan rencana pemerintah menyebabkan hilangnya legitimasi publik (Ranggi, 2016). Padahal, pemimpin fasilitatif seharusnya dapat menciptakan *shared understanding* agar setiap pihak merasa memiliki tanggung jawab bersama terhadap suksesnya revitalisasi pasar (Sirait & Anam, 2024).

3.4 Dimensi Proses Kolaboratif (*Collaborative Process*)

Proses kolaboratif merupakan jantung dari teori Ansell dan Gash (2008), yang mencakup dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses, dan pemahaman bersama. Di Pasar Kahayan, proses ini mengalami titik jenuh dan stagnasi akibat kebijakan *refocusing* anggaran APBD di pertengahan masa proyek. Peristiwa ini memutus rantai kepercayaan yang sebelumnya sempat coba dibangun (Handayani et al 2023).

Kegagalan menjaga ritme dialog tatap muka yang rutin menyebabkan pedagang merasa "ditelantarkan" saat pembangunan fisik terhenti. Proses kolaborasi yang seharusnya bersifat siklikal dan berkelanjutan menjadi terhenti, yang mengakibatkan munculnya polarisasi antara kelompok pedagang yang pasrah dengan kelompok yang melakukan aksi protes. Keadaan ini membuktikan bahwa tanpa komitmen sumber daya yang berkelanjutan, proses kolaborasi tidak akan mampu menghasilkan *intermediate outcomes* (hasil antara) yang positif bagi masyarakat (Liu, Z., Hou, X., & Wang, H. (2021). Ketiadaan pemahaman bersama (*shared understanding*) mengenai mengapa proyek tersebut harus tertunda semakin memperburuk sinergi di lapangan, yang pada akhirnya menegaskan bahwa revitalisasi Pasar Kahayan masih terjebak pada pendekatan fisik murni dan belum menyentuh dimensi tata kelola manusiawi (Zhang, X., Li, H., & Wang, Y. (2021).

3.5 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Hasil analisis lapangan yang telah dipaparkan pada sub bab sebelumnya menunjukkan dinamika yang sangat kompleks dalam proses *Collaborative Governance* pada revitalisasi Pasar Kahayan Kota Palangka Raya. Untuk memposisikan kedudukan dan signifikansi penelitian ini secara akademis, temuan-temuan krusial dari lapangan perlu didialogkan secara kritis dengan hasil-hasil riset terdahulu. Perbandingan ini dilakukan untuk membedah titik lemah, keunggulan tata kelola, serta menguji relevansi teori tata kelola kolaboratif dalam menghadapi krisis kebijakan. Berdasarkan hasil analisis mendalam, ditemukan beberapa poin krusial yang secara tegas membedakan maupun menguatkan penelitian ini dengan riset-riset sebelumnya:

Pertama, terkait dengan indikator keberhasilan revitalisasi pasar. Berbeda dengan temuan penelitian Nurlaili et al. (2022) bahwa keberhasilan revitalisasi pasar tradisional diukur dan sangat bergantung pada capaian perbaikan infrastruktur fisik, tata letak zonasi, dan manajemen operasional bangunan, temuan di Pasar Kahayan menunjukkan realitas yang bertolak belakang. Di Pasar Kahayan, penyelesaian fisik bangunan yang megah dan berstandar modern bukanlah satu-satunya penentu mutlak operasional pasar. Keberhasilan revitalisasi di lokasi ini justru sangat bergantung pada dimensi sosial dan kultural, yakni kualitas kolaborasi antar-aktor yang saat ini menjadi titik terlemah dalam tata kelola. Kesenjangan antara rancangan fisik dengan minimnya pelibatan aspirasi pedagang membuat fasilitas yang telah dibangun tidak termanfaatkan secara optimal. Temuan ini menolak penelitian sebelumnya karena perbedaan karakteristik objek penelitian; di mana pada riset Nurlaili komunitas pedagang diasumsikan pasif dan siap menerima desain dari otoritas pemerintah, sedangkan di Pasar Kahayan, para pedagang

memiliki ikatan sosio-historis yang kuat dan tingkat resistensi tinggi sehingga membutuhkan ruang dialog (*face-to-face dialogue*) yang setara dan berkelanjutan.

Kedua, mengenai pola komunikasi dan desain kelembagaan pemerintah daerah dalam menangani kelompok rentan. Temuan ini memperkuat temuan penelitian sebelumnya dari Sirait & Anam (2024) karena membuktikan secara empiris bahwa Pemerintah Kota Palangka Raya masih gagap dalam membangun kolaborasi aktif dengan masyarakat, khususnya para pelaku usaha mikro di pasar tradisional. Masalah utama yang menghambat proses revitalisasi di lapangan terbukti bukan terletak pada kerumitan arsitektur pasar atau keterbatasan lahan, melainkan murni pada cacatnya tata kelola interaksi antara birokrasi dan pedagang. Interaksi yang terjadi selama masa pra hingga pasca pembangunan sering kali bersifat monologis, instruksional, dan *top-down*. Pemerintah cenderung bertindak semata-mata sebagai regulator ketat daripada sebagai fasilitator (*facilitative leadership*) yang mewadahi kepentingan bersama. Sama halnya dengan temuan penelitian sebelumnya (seperti kajian Ella Alfianita dkk., 2015) bahwa ketiadaan transparansi dan partisipasi aktif akan melahirkan apatisme publik, temuan penelitian ini mengonfirmasi bahwa pola komunikasi monologis birokrasi di Palangka Raya telah melahirkan kecurigaan sistemik dari pihak pedagang terhadap agenda revitalisasi yang diusung pemerintah.

Ketiga, terkait kemunculan variabel eksternal berupa guncangan anggaran pemerintahan dan dampaknya terhadap kepercayaan (*trust*). Penelitian ini mengungkap fakta lapangan bahwa kebijakan *refocusing* anggaran selama masa pembangunan menjadi hambatan paling destruktif terhadap tata kelola kolaboratif. Intervensi anggaran ini memaksa penghentian komitmen awal pemerintah secara sepihak, yang berujung pada persepsi cedera janji di mata pedagang. Berbeda dengan temuan penelitian Andi Sultan (2018) dan Choirul Anam (2017) bahwa hambatan utama revitalisasi pasar umumnya berasal dari faktor internal pedagang (seperti ketidakmampuan beradaptasi dengan retribusi baru atau pola dagang modern), penelitian ini justru mengonfirmasi bahwa *refocusing* anggaran dari pihak pemerintahlah yang menjadi variabel eksternal perusak utama. Kebijakan rasionalisasi anggaran ini merusak dan mendelegitimasi kepercayaan (*trust*) antara pemangku kepentingan yang sebelumnya sudah dibangun dengan susah payah pada tahap awal kolaborasi. Akibat runtuhnya *trust building* ini, proses kolaboratif terputus di tengah jalan dan memicu sikap penolakan massal. Temuan ini menolak penelitian sebelumnya yang sering kali mengasumsikan bahwa pembangunan kepercayaan (*trust building*) berjalan secara linear dan stabil seiring waktu. Sebaliknya, penelitian ini membuktikan bahwa tanpa adanya mitigasi risiko finansial dan komunikasi krisis yang transparan dari kepemimpinan fasilitatif, guncangan eksternal sekecil apapun dapat meruntuhkan arsitektur kolaborasi seketika dan memicu kembali resistensi laten dari para pedagang lama.

3.6 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis juga mengidentifikasi fenomena menarik di lapangan:

a. Paradoks Modernisasi: Ada upaya pemerintah mengubah Pasar Kahayan menjadi pasar modern, namun cara komunikasinya masih sangat tradisional dan bersifat instruktif, bukan partisipatif. Hal ini menciptakan perlawanan diam-diam dari pedagang yang merasa hak-hak mereka terabaikan.

b. Resistensi Akibat Keterbatasan Anggaran: Kebijakan *refocusing* APBD tidak hanya berdampak pada mangkraknya bangunan, tetapi juga menjadi alat legitimasi bagi pemerintah untuk menunda pemenuhan janji-janji kepada pedagang, yang pada akhirnya memperburuk dinamika *Collaborative Governance* di tingkat lokal.
c. Jarak Komunikasi: Terdapat "jarak fisik dan mental" yang lebar antara kantor dinas dan lokasi pasar. Ketidakhadiran rutin pejabat pemerintah di lokasi pasar selama masa relokasi membuat pedagang merasa ditinggalkan, yang menegaskan bahwa kepemimpinan fasilitatif benar-benar tidak berjalan optimal di Pasar Kahayan.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa implementasi *Collaborative Governance* dalam revitalisasi Pasar Kahayan Kota Palangka Raya belum berjalan secara optimal. Meskipun secara prosedural pemerintah telah melakukan upaya pembaruan fisik pasar sebagai langkah modernisasi, namun dalam tataran praktis, proses kolaborasi yang dibangun masih terjebak pada pendekatan *top-down* yang kaku. Dimensi *Starting Conditions* diwarnai oleh ketimpangan kepercayaan antara birokrasi dan pedagang, diperparah dengan kebijakan *refocusing* APBD yang memutus kesinambungan proyek serta merusak *trust building* yang sedang dibangun.

Struktur *Institutional Design* yang ada belum mampu mengakomodasi partisipasi substantif dari para pedagang, sehingga kebijakan revitalisasi sering kali dianggap sebagai beban daripada solusi bagi pelaku usaha kecil. Selain itu, kepemimpinan fasilitatif yang diharapkan mampu menjadi mediator konflik justru cenderung bersikap birokratis dan kurang responsif terhadap dinamika lapangan. Akibatnya, *Collaborative Process* mengalami stagnasi; ketiadaan *shared understanding* mengenai urgensi dan *timeline* revitalisasi telah memicu resistensi dan hilangnya legitimasi publik. Dengan demikian, revitalisasi Pasar Kahayan saat ini masih dominan pada aspek pembangunan fisik, sementara aspek kolaborasi sosial-ekonomi yang menjadi inti dari tata kelola kolaboratif belum terealisasi secara maksimal.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan apresiasi dan terima kasih setinggi-tingginya kepada Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri beserta jajaran, serta Bapak Dr. Ir. H. Dwi Agus Sumarno, M.M, M.Si. selaku dosen pembimbing atas dedikasi dan arahan berharganya dalam penyelesaian penelitian ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada Walikota Palangka Raya beserta jajaran Dinas Perindagkop UMKM dan Dinas PUPR, para tokoh masyarakat, serta seluruh pedagang Pasar Kahayan atas keterbukaan dan dukungan datanya selama penelitian. Akhir kata, terima kasih kepada kedua orang tua dan keluarga tercinta atas doa serta motivasi

tak terhingga yang menjadi kekuatan utama penulis dalam menyelesaikan pendidikan ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Abdussamad, Z. (2021). *Metode penelitian kualitatif*. Makassar: CV Syakir Media Press. ISBN: 978-623-7574-98-9.

Afrisal. (2022). Metode penelitian kualitatif deskriptif: Pendekatan dan aplikasi. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 10(1), 1–14. DOI: https://doi.org/10.31289/jiap.v10i1

Alfianita, E., Wijaya, A. F., & Siswidiyanto. (2015). Revitalisasi pasar tradisional dalam perspektif good governance (Studi di Pasar Tumpang Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya*, 3(5), 758–762. Diakses dari https://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/view/861

Anam, C. (2017). Revitalisasi pasar tradisional: Strategi menghadapi persaingan dengan hipermarket melalui pembaruan tata kelola dan kerja sama permodalan. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(2), 45–57. Diakses dari https://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id

Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. (Scopus Q1, Oxford University Press). DOI: https://doi.org/10.1093/jopart/mum032

Arianty, N. (2013). Analisis perbedaan pasar modern dan pasar tradisional ditinjau dari strategi tata letak (lay out) dan kualitas pelayanan untuk meningkatkan posisi tawar pasar tradisional. *Jurnal Manajemen & Bisnis*, 13(1), 1–15. DOI: https://doi.org/10.30596/jimb.v13i1.93

Cai, Y., Yuen, B., & Nearing, C. M. (2026). Collaborative governance in urban regeneration: Comparative insights from Seoul, Shenzhen, Vancouver, and Vienna. Planning Practice & Research. https://doi.org/10.1080/02697459.2026.2630042.

Fanani, M. I. (2016). Resistensi pedagang lama terhadap kebijakan revitalisasi pasar tradisional (Studi kasus di Pasar Oro-oro Dowo Kota Malang). *Jurnal Publika*, 4(5), 1–10. Diakses dari https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/14632

Hanani, F., & Sundari, T. (2024). Tata kelola kolaborasi melalui Segoro Bening dan Ceting Buhari dalam penanganan kasus stunting di Yogyakarta. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 14(2), 212–224. DOI: https://doi.org/10.33701/jiwbp.v14i2.4247

Handayani, N., Risyanti, R., Suripto, S., & Simangunsong, F. (2023). Collaborative governance in poverty reduction in Bangkalan Regency, East Java Province. Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja, 13(1), 66–77. https://doi.org/10.33701/jiwbp.v13i1.3329

Huberman, A. M., & Miles, M. B. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications. ISBN: 978-0-8039-5540-4.

Ika Sartika. (2024). Collaborative governance dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*. https://doi.org/10.33701/jiapd.v16i2.4864

Islamy, M. I. (2018). *Prinsip-prinsip perumusan kebijakan negara* (Edisi Revisi). Jakarta: Bumi Aksara. ISBN: 978-979-010-426-4.

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2023). *Kebijakan revitalisasi pasar rakyat nasional*. Diakses pada 10 Januari 2026, dari https://kemendag.go.id

Kususmasuti, A. (2019). Teknik purposive sampling dan snowball dalam penelitian lapangan. *CommiT: Communication & Information Technology Journal*, 13(1), 11–16. DOI: https://doi.org/10.21512/commit.v13i1.5640

Kusuma, A., & Sugiharto, A. (2021). Penerapan transaksi non-tunai berbasis SIAP QRIS dan digitalisasi pengelolaan pasar rakyat di Kota Palangka Raya. *Jurnal Borneo Humaniora*, 4(2), 65–78. DOI: https://doi.org/10.35334/borneo_humaniora.v4i2

Lestari, S. F. I., Hamdi, M., & Rahmah, M. (2024). Jalan bermakna pemecahan masalah: Mengelola faktor penentu implementasi kebijakan Trans Metro Bandung di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 14(2), 196–211. DOI: https://doi.org/10.33701/jiwbp.v14i2.4460

Liu, Z., Hou, X., & Wang, H. (2021). Collaborative decision-making for urban regeneration: A literature review and bibliometric analysis. Land Use Policy, 107, 105479. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2021.105479

Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi Revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya. ISBN: 978-979-514-049-9.

Nugroho, S. A. (2020). Modernisasi pasar tradisional: Tantangan eksistensi di era ritel modern. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, 8(1), 23–34. DOI: https://doi.org/10.31289/jipsp.v8i1.3280

Nurlaili, N., Meriyana, R., & Safitri, A. (2022). Revitalisasi Pasar Seketeng sebagai pasar modern di Kabupaten Sumbawa. *Jurnal Kapita Selekta Administrasi Publik*, 3(2), 65–78. Diakses dari https://e-journallppmunsa.ac.id/index.php/ksap/article/view/1087

Nurlaili, N., Meriyana, R., & Safitri, A. (2022). Revitalisasi Pasar Seketeng sebagai pasar modern di Kabupaten Sumbawa. *Jurnal Kapita Selekta Administrasi Publik*, 3(2), 65–78. Diakses dari https://e-journallppmunsa.ac.id/index.php/ksap/article/view/1087

Pemerintah Kota Palangka Raya. (2025). *Revitalisasi Pasar Kahayan menuju pasar modern*. Diakses pada 5 Januari 2026, dari https://palangkaraya.go.id

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia. Diakses dari https://peraturan.bpk.go.id/Details/41143/perpres-no-112-tahun-2007

Pratama, P. Y., & Nurmandi, A. (2020). Collaborating network in managing post the Mount Merapi's disruption, Indonesia. *Jàmbá: Journal of Disaster Risk Studies*, 12(1), a927. (Scopus). DOI: https://doi.org/10.4102/jamba.v12i1.

Pramitha, Y., & Saputra, M. R. (2023). Collaborative governance dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 13(1), 55–70. DOI: https://doi.org/10.33701/jiwbp.v13i1.3329

Ranggi, A. A. (2016). Kepemimpinan fasilitatif dalam tata kelola kolaboratif: Antara teori dan praktek. *Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 8(2), 89–102. Diakses dari https://ejournal.ipdn.ac.id

Samsu. (2021). *Metode penelitian: Teori dan aplikasi penelitian kualitatif, kuantitatif, mixed methods, serta research & development*. Jambi: Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan (PUSAKA). ISBN: 978-602-53572-1-9.

Soetomo. (2017). *Pemberdayaan masyarakat: Mungkinkah muncul antitesisnya?* Yogyakarta: Pustaka Pelajar. ISBN: 978-602-229-691-1.

Subarsono, A. G. (2016). *Analisis kebijakan publik: Konsep, teori dan aplikasi* (Edisi Revisi). Yogyakarta: Pustaka Pelajar. ISBN: 978-979-12-7015-7.

Sugiyono. (2014). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. ISBN: 978-602-7825-43-9.

Sirait, M., & Anam, M. S. (2024). Kebijakan Pemerintah Kota Palangka Raya dalam pengelolaan Pasar Kahayan. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 8(1), 7–12. DOI: https://doi.org/10.31604/jim.v8i1.2024.7-12

Sultan, A. (2018). Dampak kebijakan revitalisasi pasar terhadap kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat di Kepulauan Selayar. *Jurnal Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat*, 7(1), 34–49. Diakses dari https://journal.uinalauddin.ac.id

Tribun Kalteng. (2024, November). Keluh pedagang Pasar Kahayan Palangka Raya saat kunjungan Wapres Gibran. Diakses dari https://kalteng.tribunnews.com

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia. Diakses dari https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014

Wulandari, D. (2019). Transformasi pasar tradisional menuju pasar modern: Disonansi infrastruktur dan adaptasi ekosistem pasar. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, 30(1), 55–68. DOI: https://doi.org/10.5614/jrcp.2019.30.1.

Zhang, X., Li, H., & Wang, Y. (2021). Research on the collaborative governance of urban regeneration based on a Bayesian network: The case of Chongqing. Land Use Policy, 109, 105640. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2021.105640